



MENUJU PENGAWASAN
PEMILU
EFEKTIF

HALUAN PEMIKIRAN
KETUA BAWASLU (2010)

NUR HIDAYAT SARDINI

Nur Hidayat Sardini

**MENUJU PENGAWASAN
PEMILU EFEKTIF:
HALUAN PEMIKIRAN
KETUA BAWASLU
(2010)**

Diadit Media

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

Nur Hidayat Sardini

MENUJU PENGAWASAN PEMILU EFEKTIF

Jakarta: Diadit Media, 2013.

Bibliography : xxxvi + 532; 14 X 20 cm.

ISBN : 978-979-1815-82-6

1. Politik 1. Judul

MENUJU PENGAWASAN PEMILU YANG EFEKTIF;

Haluan Pemikiran Ketua Bawaslu (2010)

Himpunan Sambutan Nur Hidayat Sardini

Ketua Bawaslu RI

Nur Hidayat Sardini

Cetakan Pertama, Mei 2013

Diterbitkan oleh Diadit Media

Kantor Pusat

Jalan Kramat Pulo No. 3 D, Jakarta Pusat

Telepon/Fax : 021-3154405 / 021-3148940

Email : diaditmedia6@gmail.com

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

All rights Reserved

Editor: Rahman Yasin

Layout: Andi K.

Desain Sampul: Bakkar Wibowo

Dipersembahkan untuk:

Ria,
Fairly,
Fairlyza,
Nabil,

para inspirasiku
betapapun seringkali:
jarak dan waktu, tak menautkan
tapi hati yang tak bisa memisahkan.

CATATAN EDITOR

Buku kumpulan pidato ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nur Hidayat Sardini (2008-2010), yang diberi judul *MENUJU PENGAWASAN PEMILU YANG EFEKTIF; Haluan Pemikiran Ketua Bawaslu (2010)* merupakan karya yang ditulis sendiri setiap menjelang memberikan sambutan/pidato kegiatan-kegiatan Bawaslu selama menjabat ketua Bawaslu.

Buku ini membahas pengawasan Pemilu secara sistematis dan penuh muatan analisis kritis tentang bagaimana menyiapkan diri serta pentingnya kemampuan *leadership* bagi setiap anggota Panwas di Indonesia. Isi pidato yang disampaikan pun sebenarnya tidak terlalu "istimewa" tetapi dari dimensi keilmuan cukup mewah bagi sebuah karya sambutan karena sarat dengan kajian akademik dan ditulis dalam waktu singkat pula.

Sebagai ketua Bawaslu dan lembaga baru, Sardini sangat memahami spirit perubahan untuk menjadikan eksistensi institusi pengawasan bisa tampil produktif dengan memetakan kiat-kiat kreatif, bagaimana membangun ekspektasi publik secara positif. Kerja keras, kecermatan berpikir dan

ketegasan sikap membangun *trust public* mampu menempatkan lembaga pengawasan Pemilu di mata masyarakat, pemerintah, DPR, dan pada realitanya, masyarakat memberikan apresiasi positif. Dalam konteks yang sederhana tentu dipahami, Bawaslu merupakan lembaga baru dan bekerja di awalnya tanpa dibekali infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai.

- 4 Buku ini secara tuntas mengupas persoalan pengawasan Pemilu baik dari sisi penyelenggaraan maupun dari aspek penanganan pelanggaran Pemilu. Dimensi sosiologis mewarnai penulisan buku ini sehingga kita akan menemukan berbagai pengalaman dan pengetahuan mengenai Pemilu.

Bagian *pertama*, penulis mengajak kita melihat bagaimana meletakkan dasar visi kerja sebuah organisasi, dengan menempatkan orientasi penataan struktur organisasi pengawasan melalui sambutan pelantikan anggota Panwas Prov/Kab/Kota. Bagian *kedua*, meningkat pembahasan jadi bagaimana merencanakan suatu program secara sistematis dan implementatif. Bagian ini mengisi sambutan kegiatan Raker, dan Rakor internal. Bagian *ketiga*, penulis menghadirkan sambutan persiapan bagi anggota Panwas dalam menghadapi persidangan PHPU di Mahkamah Konstitusi. Sementara bagian *keempat*, penulis menyodorkan kiat-kiat strategis bagi anggota Panwas melakukan deteksi dini dan mencegah pelanggaran Pemilu. Bagian ini berisi sambutan kegiatan Bimtek dan peringatan HUT RI ke-65. Pada bagian *kelima*, penulis menuangkan gagasan perubahan dan penyampaian hasil kerja pengawasan melalui sambutan RDP Komisi II DPR RI, seminar, diskusi, sosialisasi, lokakarya yang dikemas dengan penuh pendalaman materi. Sedangkan bagian *keenam*, merupakan bagian akhir dari sambutan, menghadirkan serangkaian penandatanganan MoU dengan lembaga-lembaga

terkait dalam pengawasan Pemilu Kada.

Dengan demikian, tidak ada yang tersisa dari semua rangkaian kegiatan formal kelembagaan yang tidak terekam dalam buku ini. Keunggulan buku ini ditulis sendiri oleh seorang aktivis yang tergolong "berwarna" karena sesuai rekam jejaknya, aktif, dan berkecimpung di berbagai medan pengabdian.

Dalam konteks memimpin Bawaslu, meminjam teori sosiologi kritis, Peter L. Berger dan Erving Goffman (1986), tentang paradigma produksi atau pertukaran makna, Sardini sekurang-kurangnya telah menempatkan lembaga pengawasan Pemilu sebagai sebuah lembaga yang telah mampu mentransmisi gagasan dan praktikal pengawasan Pemilu secara komprehensif.

Saya senang dan bangga membaca buku ini, karena secara konseptual memberikan sumbangan penting dalam kajian kritis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilu Kada di Indonesia. Sardini dalam konteks penulisan pengawasan Pemilu setidaknya menempatkannya pada "barisan pertama" yang mengambil peran kreatif dengan melakukan pembukuan karya tulis mengenai pengawasan Pemilu dan Pemilu Kada di Indonesia.

Membaca buku ini amatlah penting terutama bagi para anggota Panwaslu Kada, KPU, di setiap jenjang serta pegiat/pemerhati Pemilu, kaum intelektual dan akademisi yang *concern* terhadap masa depan peradaban bangsa yang lebih demokratis dalam kerangka penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Kehadiran buku ini sangat membantu bagi para pemangku kepentingan yang hendak belajar dan mau memahami pengawasan Pemilu. Buku ini setidaknya menjadi bagian dari ikhtiar intelektual penulis memperkaya khasanah

x NUR HIDAYAT SARDINI

wacana pengawasan Pemilu bagi kita untuk memahami kompleksitas Pemilu di Indonesia.

Jakarta, 05 Februari 2013

Rahman Yasin

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.
Ketua Panwaslu Pangkep, Sulawesi Selatan

Pada waktu saya ditelpon Pak Nur Hidayat Sardini, saya menanyakan kenapa saya yang diminta untuk menulis kata pengantar buku **"Menuju Pengawasan Pemilu Efektif: Haluan Pemikiran Ketua Bawaslu (2010)"** ini? Bukankah saya hanya seorang Ketua Panwaslu di sebuah kabupaten, yang jauh dari ibukota provinsi apalagi ibukota negara? Pak Sardini tidak menjawab secara eksplisit pertanyaan saya. Hanya yang masih saya ingat adalah begini, kira-kira: "Prof. Anwar, sebuah sambutan yang disampaikan pimpinan semestinya beresonansi hingga ke bawah. Kalau Prof. Anwar menjabat Ketua Panwaslu di sebuah kabupaten, maka saya ingin mengukur sejauhmana resonansi tersebut hingga nun jauh di sana, seyogyanya ke Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di setiap desa-desa kita? Dan dengan pertimbangan lainnya pula, Prof. Anwar adalah orang yang paling tepat untuk itu," begitu argumentasi Pak Sardini sewaktu menelpon saya.

Saya menulis kata pengantar ini sesuai yang diminta, dengan mengangkat butir-butir pemikiran Pak Sardini dalam memimpin Bawaslu. Saya akan menyinggung pemahaman saya akan gaya atau corak beliau dalam menyampaikan pesan visi, misi, dan program kerja Bawaslu. Juga bagaimana pemahaman karakter kepemimpinan dari Pak Sardini, yang tentu saja sesuai apa yang saya tangkap dan pahami. Dan yang terakhir, latar belakang atau konteks sambutan ini disusun dan disampaikan.

Latar Belakang

Saya pernah menjadi Ketua Panwaslu Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2008, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009, serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati tahun 2010 yang lalu. Sambung-menyambung sebagai anggota Panwaslu, membuat saya makin paham praktik penyelenggaraan pengawasan Pemilu. Di samping itu, latar belakang akademis saya di bidang ilmu hukum, sangat membantu saya akan pemahaman saya di lapangan.

Setiap kali bertemu muka dengan Sardini, saya selalu berbincang akrab dengannya. Boleh dikatakan beliaulah yang lebih sering menyapa hangat dengan kami, karena yang saya lihat kepada semua orang Sardini juga begitu. Pertama saya bertemu dengan beliau saat ada kunjungan kerja Mendagri ke Makassar dalam rangka final checking Pileg 2009, dan Sardini menyertai kunjungan itu. Malamnya, Ketua Bawaslu itu memberi pengarahan kepada seluruh anggota Panwaslu Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan. Sepertinya beliau selalu menyempatkan diri untuk bertemu muka dengan aparatnya ketika ke daerah. Itu diulangnya setiap kali berada di

Makassar, selalu menyambangi kami-kami. Jauh setelah itu, di saat Bawaslu sedang “berperang” dengan KPU dalam menentukan Panwaslukada, kembali kami berdialog dengan Ketua Bawaslu. Jelas sekali Sardini bergetar saat menyampaikan perlunya Panwaslu menjalin kekompakan. Satu komando di bawah perintah Bawaslu, kata beliau memberi pesan agar tidak ada seorang pun anggota Panwaslu yang mendaftar rekrutmen Panwaslu versi KPU. Sejarah akhirnya membuktikan bahwa “perang” itu dimenangkan oleh Bawaslu.

Dalam forum resmi juga, saya mengikuti rangkaian Rakor, Bimtek, Pembekalan, Pelatihan, dan Rapat Evaluasi, baik yang digelar di Jakarta, Makassar, Manado, maupun kota-kota lain. Dalam kesempatan seperti itu saya menyimak atas apa yang disampaikannya. Karena bagi saya, apa yang disampaikannya akan saya teruskan kepada Panwas di bawah pembinaan saya. Itulah forum pengenalan saya kepada Sardini.

Dari apa yang saya dengar, lihat, rasakan, dan alami sendiri, saya menangkap kesan-kesan sambutan Ketua Bawaslu. *Pertama*, dia menguasai persoalan yang menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya. Pernah menjadi Ketua Panwaslu di sebuah provinsi besar seperti Jawa Tengah, menurut saya itu jaminan tersendiri. Kompleksitas persoalan di Jawa dengan di luar Jawa tetap berbeda. Dinamika sosialnya pun juga relatif berbeda. Maksudnya adalah Sardini dapat dikatakan telah teruji. Tidak saja menguasai persoalan Pemilu, namun juga menguasai persoalan pengawasan secara menyeluruh.

Oleh karena menurut saya, orang yang menguasai Pemilu belum tentu menguasai pengawasan Pemilu. Namun mereka yang menguasai pengawasan Pemilu sudah barang pasti

menguasai persoalan Pemilu. Karena untuk menguasai pengawasan Pemilu, basisnya ada di penguasaan Pemilu. Karena pada aspek pengawasan, terkandung pula penegakan hukum Pemilu. Itu jelas tak bisa ditinggalkan.

Kedua, menguasai detil alur Pemilu, tahapan-tahapan Pemilu, problematika setiap tahapan, juga paralel dengan konsep pengawasan, strategi, metode, pendekatan, objek, dan subjek pengawasan, dan hal-hal lain menyangkut persoalan Pemilu. Sebagai seorang pucuk pimpinan, saya lihat Pak Sardini tidak saja menguasai konsep-konsep pengawasan Pemilu dimaksud, namun pula mampu menjabarkan, memberi contoh kasusnya, dan bagaimana tata cara menindaklanjutinya. Kalau pada akhirnya buku ini ditulis berdasarkan catatan beliau dalam menyampaikan sambutan, maka saya kira komplet penguasaan itu. Karena menurut saya, seorang pimpinan harus bisa memberi contoh-contoh kasus, karena saya tahu apakah seseorang menguasai atau tidak terhadap setiap persoalan, tergantung pada bagaimana caranya menyampaikan persoalan yang menjadi tugas-tugasnya.

Ketiga, memiliki visi kepemimpinan. Menurut saya tidak mudah mengetuai sebuah lembaga dengan kondisi yang terbatas atau memulai membangun sebuah lembaga dari nol sama sekali. Sumber daya, baik uang maupun barang, serta sarana dan prasarana, yang mulanya tak ada sama sekali, lambat laun dirintis dengan caranya sendiri. Kendatipun dibangun dengan segenap anggota Bawaslu, namun apabila ketuanya tidak mempunyai konsep dan arahnya yang jelas, tetap saja hal itu tidak akan bisa berjalan. Walaupun jalan biasanya akan terseok-seok, jalannya lembaga mungkin akan biasa-biasa saja. Pihak luar akan menilai lembaga itu sebagai "adanya sama saja dengan tidak adanya". Bila tidak ada visi, muskil lembaga Bawaslu akan "memenangkan" balas

pantunnya dengan KPU, dalam hal pembentukan Panwaslu. Kada sepanjang akhir 2009 dan awal-awal tahun 2010. Lembaga itu tidak akan mampu membangun infrastruktur, sistem, dan struktur di bawahnya, di samping dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, karena yang paling penting adalah konsistensi dan suri teladan dalam membangun kepemimpinan visioner tersebut.

Keempat, gaya bicara yang serius tapi santai (sersan). Setiap anggota Panwaslu mengerti bagaimana gaya pembawaan Sardini. Menurut saya, orang itu sebenarnya sangat serius, karena yang saya lihat, saat mengawali sambutan saja, selalu saja disampaikan pokok pikiran yang hendak disampaikan terlebih dahulu. Ini gaya khas seorang dosen, seperti saya juga ketika hendak memberikan kuliah kepada mahasiswa saya. Lalu satu per satu pokok pikiran tersebut diuraikan kepada yang hadir. Dimulai dari "nilai-nilai yang seharusnya" (*ontologis*), berikutnya "nilai-nilai yang berupa pengalaman dan dengan contoh empirik" (*epistemologis*), dan diakhiri dengan "nilai-nilai kemanfaatan yang harus dikerjakan" (*aksiologis*). Meskipun tampak serius, Pak Sardini menyampaikan dengan cara yang mudah dimengerti oleh pendengar. Bahkan terkadang membuat yang hadir terpingkal-pingkal.

Semua orang tahu terutama mereka yang pernah menjadi anggota Panwaslu, bahwa betapa beratnya beban menjadi anggota Panwas. Banyak tantangan dan godaan yang berasal dari peserta Pemilu, demikian pula dengan pelanggaran yang dilakukan oleh para peserta Pemilu semakin menambah beratnya beban itu. Hal ini juga lebih diperparah lagi dengan sikap KPUD yang selalu bersikap kontroversial. Kami sering mengalami hal-hal seperti itu. Dan semua beban yang kami alami tersebut akan sirna bilamana bertemu

dengan Pak Ketua, demikian sering beliau disapa akrab. Saya sendiri selain anggota Panwas juga sekaligus akademisi pada Fakultas Hukum Unhas, dan dari sisi usia mungkin saya lebih tua dari beliau, namun saya pun merasa santai, damai, dan nyaman jika bertemu dan berdiskusi dengannya.

4 Butir Keson

Buku ini baik untuk dibaca setiap anggota Panwaslu, dan saya sudah mempelajari dari awal hingga akhir. *Pertama*, sambutan beliau saat pelantikan anggota Panwaslu Kada. Ini merupakan pesan untuk Panwaslu yang baru untuk melakukan langkah-langkah setelah dilantik, sekembalinya ke daerah masing-masing. Di samping itu, disinggung pula dasar-dasar pengawasan, terkait strategi, pendekatan, metode, dan seterusnya, disampaikan pada bagian ini. *Kedua*, sambutan yang disampaikan pada forum-forum internal, seperti rangkaian pada Raker dan Rakor. Di sini dimuat bagaimana pandangan beliau terkait dengan performa seorang anggota Panwaslu dalam melakukan pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa.

Ketiga, khusus perihal apa yang mesti dipersiapkan, dilakukan, dan dikawal bagi Panwaslu dalam menghadapi persidangan PPHU di MK. Bagi Bawaslu, forum PPHU merupakan indikator sejumlah hal, karena kata Ketua Bawaslu ini, PPHU adalah pertarungan apakah pengawas Pemilu dinilai efektif ataupun tidak. *Keempat*, peranan Bawaslu dalam sejumlah sisi dalam rangka peningkatan kinerja mereka. Hal-hal yang bersifat tambahan sehingga untuk dijadikan pegangan bagi pengawas Pemilu, di sini disampaikan Ketua Bawaslu. Sebagai contoh soal deteksi dini. Seorang pengawas Pemilu harus tahu bahkan sebelum orang lain atau pihak lain mengetahuinya.

Itulah kemampuan deteksi dini yang disyaratkan Bawaslu. Pesan Ketua Bawaslu dalam upacara bendera pun, dimuat di bagian ini.

Kelima, pada forum-forum dengan DPR RI, Pak Sardini mewakili Bawaslu. Dalam seminar, diskusi, sosialisasi pengawasan Pemilu Kada, Lokakarya, dan buka bersama dengan para mitra kerja, dia memberikan pandangan-pandangannya, tentu saja mewakili kepentingan lembaga. Dan terakhir, *keenam*, untuk menjangkau efektivitas pengawasan dan penegakan hukumnya, Bawaslu membangun kerjasama dengan para pemangku kepentingan. Itulah yang akhirnya Ketua Bawaslu, saat penandatanganan tersebut, memberikan sambutannya. Seperti yang saya tahu, pengawas Pemilu ini memiliki kewenangan yang terbatas. Di sinilah pentingnya koordinasi dan sinergi dengan lembaga-lembaga lain.

Dalam buku "**Menuju Pengawasan Pemilu Efektif: Haluan Pemikiran Ketua Bawaslu (2010)**" ini, Ketua Bawaslu mengingatkan kepada kami, materi sambutan yang disampaikan ini sarat dengan pemikiran tentang konsep dan gagasan akan tugas pokok dan fungsi pengawasan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Di dalam pidato-pidato beliau yang disampaikan dengan gaya serius tapi santai (sersan), yang seringkali diselengi dengan guyonan, tapi sesungguhnya terkandung bernas-bernas dalam membangun lembaga pengawas Pemilu. Tujuan dari yang dilakukan adalah agar pengawasan yang dilakukan itu efektif, sebagai salah satu asas dalam penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu, saya menghargai diterbitkannya karya ini. Bagi anggota pengawas Pemilu, buku ini dapat menjadi pedoman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), dan bagi pembaca umum buku ini merekam jejak langkah yang sudah

dilakukan Ketua Bawaslu dalam membangun lembaga yang dikelolanya.

Semoga buku ini bermanfaat. Amien ya rabba'alamien.

Makassar, 11 Mei 2011

Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.



KATA PENGANTAR

Dr. Muhammad, S.IP, M.Si.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia

Alhamdulillah, secara pribadi dan atas nama Badan Pengawas Pemilu RI menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas gugusan gagasan Sdr. Nur Hidayat Sardini yang inovatif dan kreatif terkait pengawasan Pemilu dalam sebuah buku yang berjudul: **MENUJU PENGAWASAN PEMILU YANG EFEKTIF; Haluan Pemikiran Ketua Bawaslu RI 2010.**

Menyimak kandungan buku ini menunjukkan kekayaan referensi teoritik mutakhir terkait pengawasan Pemilu serta kemampuan penulis untuk mengkontekstualisasi dalam realitas dan dinamika pengawasan Pemilu di Indonesia.

Buku cerdas ini juga mampu menghadirkan *skill* dan kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh seorang pengawas Pemilu. Dengan membaca cerdas kandungan buku ini seorang pengawas Pemilu akan dapat memahami filosofi dan tantangan pengawasan Pemilu.

Sepatutnya jika buku ini menjadi bacaan wajib bagi seorang pengawas Pemilu dalam rangka aktualisasi dan implementasi tugas, fungsi dan perannya secara efektif dan optimal.

Semoga karya cerdas ini bisa menjadi momentum strategis bagi hadir dan terbangunnya pengawasan Pemilu yang lebih baik dan berkualitas di Republik tercinta ini.

Jakarta, 28 Oktober 2012

Dr. Muhammad, SIP, M.Si.

PENGANTAR PENULIS

Di suatu siang di ruang kerja saat istirahat, staf Humas Bawaslu, Sdr. Rahman Yasin memperlihatkan segepok berkas yang cukup tebal, kumpulan sambutan saya yang pernah saya sampaikan pada sejumlah forum, selama saya menjabat Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sekilas saya mencermati lembar demi lembar. Saya memuji inisiatif dan kerja kerasnya, untuk mengoleksi dan menyusun dalam tematika yang relevan, untuk kemudian disistematisasi dalam bandelan naskah di tangan saya kala itu.

Saya tanya kepada Sdr. Rahman, mau diapakan segepok naskah ini? Dia jawab untuk diterbitkan jadi buku. Dengan halus, saya mulanya menolaknya, karena bagi saya, sebuah buku haruslah lebih dari sekadar itu. Dia bilang lagi, naskah ini, bos, katanya, bukan sekadar naskah pidato biasa, sebagaimana pejabat pada umumnya, yang naskah sambutannya disusun para stafnya. Katanya lagi, banyak hal yang bisa dipetik dari substansi dalam naskah ini dan layak untuk diketahui publik. "Ini kan semacam haluan pemikiran Ketua Bawaslu dalam membawa dan membangun lembaga ini", katanya lagi. Saya terdesak dengan usulannya,

tapi saya minta waktu untuk menimbang gagasan lelaki asal Pulau Adonara, Nusa Tenggara Timur (NTT) ini.

Untuk beberapa bulan setelah pertemuan itu, saya merasa "dikejar-kejar" Sdr. Rahman akan nasib naskah tersebut, hingga akhirnya dia datang kembali dengan membawa dummy buku, yang diberinya tajuk "Menuju Pengawasan

4. Dan akhirnya saya menyerah atas "tekanan" Sdr. Rahman. Saya bilang, terserah kamulah mau *diapain* naskah ini. Demikianlah hingga akhirnya saya diminta rekomendasi siapa yang paling pas untuk menulis kata pengantarnya. Saya jawab, sebaiknya anggota Panwaslu di kabupaten atau bila perlu seorang Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di sebuah desa saja bagaimana? Kali ini Sdr. Rahman menyetujui. Maka dicarilah siapa yang paling tepat untuk diundang menuliskan kata pengantar. Dengan segala pertimbangan, saya menetapkan Prof. Anwar, Ketua Panwaslu di Pangkep, yang sekaligus akademisi terkemuka di Universitas Hasanuddin, Makassar, untuk menulis kata pengantar buku ini.

Menulis sendiri

Benar belaka kata Sdr. Rahman, saya selalu menulis sendiri sambutan. Saya merasa lebih *sreg* dengan apa yang ada dalam pikiran saya. Walau demikian, bukan berarti staf Bawaslu tak menyediakan naskah sambutan untuk saya. Bila sudah demikian, saya sekadar membaca sekilas naskah tersebut, namun saya lebih suka menyampaikan dengan naskah yang saya siapkan. Dalam penilaian saya, naskah sambutan yang disediakan staf biasanya tak "berenergi" dan miskin jangkauan visi dan misi. Di samping itu, saya merasa "tersinggung" bila harus membaca naskah sambutan saya

yang telah disiapkan staf. Masa' hanya untuk sebuah sambutan saja, seorang pejabat tidak memiliki waktu untuk menyiapkannya. Saya akan jatuh gengsi kalau saya dinilai tidak memiliki kemampuan atau tidak menguasai persoalan yang menjadi tugas, wewenang, dan kewajibannya. Lalu apa kerjaan saya? Sebagai orang dengan latar belakang penulis dan akademisi, malu rasanya bila sambutan saja saya harus disusun oleh bawahan saya. Pandangan seorang staf *kan* hanya sesuai lingkup tugasnya, padahal seorang ketua pada sebuah lembaga, harus melihat atau memiliki perspektif segala sesuatunya secara holistik.

Maka dalam situasi yang sesibuk apapun, saya selalu menyiapkan naskah sambutan saya tadi, betapapun ketika di mimbar, biasanya saya tidak membaca "plek" seperti yang saya tulis itu. Enaknya bila naskah dibuat sendiri, ketika tampil di mimbar, sepertinya saya dituntun huruf per huruf, frasa per frasa, kalimat per kalimat, dan paragraf demi paragraf, hingga materi yang saya sampaikan mengungkap isi hati yang terdalam. Pada bagian-bagian tertentu malah saya sering berimprovisasi dengan di luar apa yang saya tulis. Saya tidak mau, apa yang saya ungkapkan, apalagi disampaikan dalam forum-forum resmi, adalah hasil olahan atau konsep dari pihak lain, siapa pun orangnya itu.

Dengan menulis sendiri sambutan saya, saya akan merasa dikontrol oleh hati nurani saya, sehingga apa yang saya bayangkan terhadap lembaga yang saya kelola, keluar dari pemahaman yang utuh dari pribadi saya sendiri. Bila saya sekadar membaca teks pidato yang disiapkan staf, saya akan "dikendalikan" oleh pikiran staf. Pengetahuan staf tentunya tak selengkap, tak sevisi dan misi dengan saya, dengan keterbatasan yang pasti ada di mereka. Kalau saja terbatasnya mereka kelak saya membacakan dan ditangkap oleh para

audiens, lalu materi sambutan tersebut harus dilaksanakan oleh jajaran Panwaslu di bawah, apa jadinya Panwaslu di daerah melakukan pengawasan Pemilu? Ibarat saluran air di atap rumah, makin ke bawah makin *icrit-icrit*. Dari mereka pula, yakni anggota Panwaslu, apa yang saya sampaikan menjadi haluan untuk dilaksanakan bagi jajaran Panwaslu hingga jenjang paling rendah.

- 4 Saya sendiri pernah menjadi penulis naskah sambutan (*speech writer*) pada beberapa penggalan terakhir rektor saya, Prof. Dr. Muladi, S.H., sosok yang aku hormati selain orang tua saya. Usai Prof. Muladi ditunjuk Presiden BJ Habibie, saya masih melanjutkan tugas-tugas tersebut di bawah kepemimpinan Rektor Universitas Diponegoro, Prof. Ir. Eko Budihardjo, M.Sc., hampir dua periode belakang. Oleh karena itu, saya mengerti bagaimana suasana kebatinan kepenulisan sebuah naskah sambutan yang dilakukan staf.

Di bagian lain, saya juga menyempatkan diri untuk selalu menulis *outline* bahan penyampaian keterangan Bawaslu pada forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI, atau forum-forum resmi lainnya, begitu pimpinan DPR RI atau pihak lain mengundang kami. Isi *outline* biasanya tematika apa yang diminta DPR RI atau lembaga lainnya itu kepada Bawaslu, untuk kemudian saya kembangkan sendiri sesuai kepentingan lembaga. Setelah saya bagikan kepada anggota dan staf untuk mengerjakannya, saya akan "menjahitkan" kembali setelah mereka menyerahkan materi yang digariskan, sehingga saya menyusunnya dalam bab per bab—meskipun untuk itu saya mengerjakannya hingga larut malam. Karena bagi saya, sebuah laporan itu strategis adanya. Jangan meremehkan sebuah laporan lembaga yang kita kelola, karena akan memperlihatkan banyak hal terhadap sebuah lembaga: tertib administrasi, kepaduan antarbagian

di dalam lembaga tersebut, apakah konsisten dengan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana garis undang-undang, dan keterjagaan dalam pengejawantahan rensana strategis yang sebelumnya disusun. Di samping itu, orang hanya akan mengenal dan mengenang sebuah lembaga, paling tidak dari hasil laporannya—karena terdokumentasi selama-lamanya, selama orang membacanya.

Dengan menulis dan menyampaikan sendiri setiap sambutan, saya memiliki kesempatan untuk menyampaikan garis-garis haluan lembaga yang saya pimpin. Sebagai seorang ketua, saya dituntut untuk memaparkan kebijakan lembaga, apa yang menjadi keputusan pleno lembaga, dan akhirnya suasana kebatinan lembaga akan tersampaikan kepada jajaran pengawas Pemilu. Di samping itu, dengan menulis dan menyampaikan secara sendiri setiap sambutan seorang ketua, maka visi, misi, dan program kerja lembaga, akan ditangkap dari orang pertama dan kesempatan pertama, sehingga apa yang ditangkap jajaran lembaga atau pihak di luar lembaga, akan merasa lebih *ngeh* daripada, sekali-lagi, apa yang disampaikan seorang staf dimaksud. Bukankah seorang ketua bertanggung jawab ke dalam dan ke luar? Begitu lah.

Kenapa harus ditulis sendiri setiap sambutan? Saya terkesan dengan Bung Karno, yang selalu menulis sendiri sambutan-sambutannya. Syahdan, sosok pendiri republik ini, bahkan bisa berhari-hari menyepi di Istana Cipanas, hanya untuk menyiapkan naskah sambutannya. Seperti kita tahu, kala berdiri di podium, Bung Karno justru tidak pernah berkutat pada teks yang sudah disiapkannya. Tapi apa yang diucapkannya, gaya singa podium-nya menggelegarkan seantero dan membuat setiap yang menyimak sambutannya akan terpaku, terkunci, dan terhenyak, sehingga satu patah kata

pun tak akan terlewat dari mulut yang menyimaknya.

Saya tentu “jauh langit dari bumi” bila dibandingkan dengan Bung Karno. Tapi beliau mengajarkan kepada kita bagaimana seorang pemimpin harus bersusah payah dengan tanggung jawabnya. Beliau itu serius dengan apa yang ditulisnya, lalu diucapkannya dalam rangkaian sambutan yang disampai-kannya. Bagi saya, Bung Karno tahu benar setiap kata yang disampaikan kepada rakyatnya harus benar-benar ditangkap, diresapi, dan dimengerti hingga dilaksanakan oleh setiap yang mendengarnya. Setiap visi yang diungkapkannya, harus menjadi visi setiap rakyat dari bangsa ini. Sungguh muskil akan keberhasilan sebuah lembaga dalam mewujudkan visi, misi, dan program kerjanya, kira-kira begitu tangkapan saya atas sosok Bung Karno, apabila para bawahan dari sebuah organisasi publik yang dikelolanya itu, tak ditangkap dari apa yang diinginkan para pimpinannya. Sungguh ironi apabila visi dan misi seorang bos gagal ditangkap para pemangku struktur hingga paling bawah sekalipun.

Bagi saya, setiap sambutan yang ditulis sendiri oleh pejabat penyampainya, mencerminkan kapasitas kepemimpinannya. Kalaupun saya tahu bahwa sebuah sambutan hanyalah sebuah sambutan, yang apabila efektif disampaikan belum menjamin keberhasilan visi, misi, dan program kerjanya itu di lapangan, namun sebuah postulasi perihal sambutan telah memperlihatkan, bahwa dari sebuah sambutan merupakan bagian tak terpisahkan dari bagaimana cara pengelolaan sebuah organisasi publik dioperasionalisasikan. Pengorganisasian sebuah lembaga, katanya, tercermin dari bagaimana kinerja lembaga itu — dan demikian sebaliknya.

Oleh karena di sini menyiratkan pengorganisasian gagasan besar dari apa yang telah digariskan dalam dokumen Rencana

Strategis (Renstra) lembaga. Tanggung jawab seorang pemimpin adalah mengejawantahkan visi, misi, dan program lembaga, dengan sentuhan manajemen yang diperlukan. Itulah kenapa pentingnya peran seorang pemimpin dalam mengorganisasi gagasan, tercermin dari karakter garis-garis yang dituangkan dalam pengorganisasian lewat tulisan yang disusun sendiri oleh seorang pemimpin dimaksud.

Perihal Buku Ini

Saya tidak menyangka bahwa buku ini telah disistematisasi sedemikian rupa, sehingga ketujuh bagian yang dimuat di dalamnya layak disebut runtut dan fokus dalam lumuran pesan, sekaligus menjadi catatan rekaman perjalanan sejarah dari sebuah lembaga puncak dalam pengawasan Pemilu se-Tanah Air, yang dibangun dari nol sama sekali hingga dalam bentuknya yang sekarang ini. Pertama-tama dimulai dari forum pelantikan, yang saya anggap sebagai ajang peletakan dasar fondasi personalitas dan institusionalitas pengawasan. Fondasi yang saya maksud harus diperkokoh pada kesempatan rakor dan raker pengawasan. Makin dikuatkan pada sejumlah forum pembekalan Panwaslu yang hendak dimisikan dalam kesaksian pada pembekalan Persidangan PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi (MK). Responsivitas pihak luar pun perlu diukur, sehingga penyampaian pesan dimaksud diefektifkan dalam forum-forum yang melibatkan para pemangku kepentingan lain dari Bawaslu. Demikian halnya pada forum penandatanganan nota kesepahaman dengan pihak lain, suatu pesan dalam rangkaian sambutan memiliki potensi untuk mengundang penilaian dari pihak luar.

Saya menyadari bahwa yang disebut buku ini masih menyer-

takan sejumlah kelemahan. Karena apapun, yang namanya kumpulan sambutan tak seluruhnya bisa mencerminkan seluruh hal yang sempurna dari sebuah hasrat besar untuk memberi pesan yang utuh. Apalagi saya merasa, tidak seluruh sambutan yang pernah saya sampaikan selama saya menjabat Ketua Bawaslu dimuat dalam buku ini. Sekadar diketahui, saya menjabat Ketua Bawaslu antara tahun 2008 hingga 2011. Yang dimuat atau dibukukan Sdr. Rahman Yasin ini adalah penggalan sambutan saya pada periode tahun 2010, utamanya musim-musim persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian Pemilu pada pertama pasca Pemilu tahun 2009. Dan hal itu pun, yakni kenapa hanya kumpulan sambutan untuk penggalan 2010, saya tidak perlu menanyakan untuk sambutan antara tahun 2008 hingga 2009 serta antara 2010 hingga 2011, karena sejak awal pun saya kurang meminati penerbitan buku ini, semata-mata menghargai saudara saya, Rahman Yasin, atas kerja kerasnya itu. Ini karena saya sendiri akan memaklumi perihal rangkaian sambutan yang dipaksa menjadi kumpulan sebuah buku, tentu akan mengemuka akan kemungkinan keterbatasan ruang dan waktu. Padahal bila dirunut naskah-naskah sambutan di luar yang dimuat ini masih berserak di file laptop saya.

Tapi apapun, secara khusus, saya ingin berterima kasih kepada Sdr. Rahman Yasin, yang telah bersusah payah menyiapkan sehingga memungkinkan buku ini hadir di tangan pembaca. Demikian halnya kepada Prof. Anwar Borahima, saya berucap terima kasih atas kesediaannya menulis kata pengantar buku ini. Benar saja Prof, bahwa saya hanya ingin menempatkan Panwaslu di daerah sebagai mitra kerja pengawasan yang baik, paling kurang saya maksudkan sebagai representasi responsivitas dari daerah. Kepada Ketua Bawaslu akhie Muhammad,

yang mungkin beberapa di antaranya pernah menyimak sejumlah sambutan ini saat menjabat Ketua Panwaslu Sulawesi Selatan, saya juga berhatur terima kasih atas perkenannya untuk memberi sambutan dalam buku ini. Dan tak lupa pula kepada para kolega saya di Bawaslu yang lalu, dari Mas Bambang, mBa Wahidah, mBa Tio, hingga mBa Nunung, saya mengucapkan terima kasih atas segala kekompakan yang pernah terjalin selama kita di Bawaslu. Sekali lagi, terima kasih. Hanya kepada Allah saya berserah diri.

Tembalang Semarang, 17 September 2012

N H S

RIWAYAT PENULIS



NUR HIDAYAT SARDINI, dilahirkan di Pekalongan, 10 Oktober 1969. Hampir separuh kariernya dihabiskan di lingkungan yang terkait dengan kepemiluan, baik karena mengajar ilmu politik terkait dengan urusan Pemilu maupun praktisi pengawasan Pemilu. Pada Pemilu tahun 2004, tepatnya antara

tahun 2003 hingga 2004, Sardini menjabat Ketua Panwaslu Provinsi Jawa Tengah, mewakili unsur Perguruan Tinggi se-Jawa Tengah, mengingat pengawas Pemilu berdasarkan UU No. 12 Tahun 2003 dan UU No. 23 Tahun 2003 mengenai keterwakilan unsur— selain tokoh masyarakat, kepolisian, kejaksaan, dan pers.

Pada Pemilu selanjutnya, dengan dasar UU No. 22 Tahun 2007, Sardini terpilih sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu tahun 2004 sejak tahun 2008 hingga 2011. Kini, berdasarkan UU No. 15 Tahun 2011, dia terpilih kembali sebagai anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang dilantik Presiden SBY pada 12 Juni 2012, mewakili unsur DPR

RI bersama Ketua DKPP Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., dan Pdt. Saut H Sirait, sementara anggota DKPP lain adalah Ida Budhiati mewakili KPU, Nelson Simanjuntak mewakili Bawaslu, serta Prof. Abdul Bari Azed, S.H. dan Dr. Valina Singka Subekti dari unsur Pemerintah.

Hingga kini Sardini masih tercatat sebagai staf pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro (Fisip-Undip), Semarang. Semasa kuliah, Sardini aktif di dunia pers kampus, di Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro, juga organisasi ekstra dan intra kampus. Pernah menjabat Ketua Umum Majelis Sinergi Kalam (Masika), sekarang menjadi elite pengurus di Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Di KAHMI Sardini tercatat sebagai Direktur Lembaga Politik dan Demokrasi PKMN KAHMI.

Ayah dari Fairly Visnumurti Hidayat, Fairlyza Krinamurti Hidayat, dan Nabil Syahputra Hidayat, serta suami dari Endang Riagustrianingsih ini, tengah merampungkan studinya di Program Pasca Sarjana Ilmu Politik, Universitas Padjajaran, Bandung, di sela-sela kesibukannya di Bawaslu dan sekarang di DKPP. Katanya, sejak berkarier di organisasi kepemiluan, dirinya selalu pembuka lembaga-lembaga resmi yang baru dibentuk, yang artinya selalu membangun dari nol sama sekali, termasuk keterlibatannya di DKPP, yang dibentuk berdasarkan UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu tersebut.

Dalam suatu kesempatan di sela-sela seabrek kegiatannya, Sardini masih bisa dijumpai di akun twitter-nya "@nurhidayatsardi" atau akun facebook sesuai namanya "Nur Hidayat Sardini" setiap saat. Pada akun facebooknya ini Sardini sering menulis status yang inspiratif, perihal apa

saja, tapi yang penting tidak mau menyinggung SARA, kalau bisa memotivasi bagi sebanyak mungkin orang. Selain itu, Sardini masih aktif mengelola web pribadinya www.nurhidayatsardini.com, yang katanya dibuat sejak 1997 dari bekas mahasiswanya. Kapan waktu bila pembaca senggang, silakan bertamu dengan segala saluran jejaring sosialnya itu. *